

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Merujuk kepada permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang telah ditetapkan, dan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dirumuskan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Implementasi muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung berdasarkan hasil analisis Model Glickman, berada pada kategori kurang baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi kurikulum muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung belum sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil evaluasi yang diperoleh pada aspek konteks menunjukkan hasil negatif, aspek masukan menunjukkan hasil negatif, aspek proses menunjukkan hasil positif, dan aspek produk menunjukkan hasil positif. Berdasarkan keempat aspek tersebut, terbentuk pola (-,-,+,+). Pola tersebut apabila dimasukkan ke dalam Model Glickman, maka akan berada pada kategori kurang baik.
2. Implementasi muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung berdasarkan aspek konteks menunjukkan hasil negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung pada aspek konteks belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2013 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Hasil negatif yang diperoleh dari aspek konteks disebabkan oleh rasional penyelenggaraan muatan lokal yang masih terpaku pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tanpa melakukan analisis konteks terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
3. Implementasi muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung berdasarkan aspek masukan menunjukkan hasil negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung pada aspek konteks belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 79 Tahun

- 2013 tentang Muatan Lokal pada Kurikulum 2013, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Hasil negatif yang diperoleh dari aspek masukan disebabkan oleh penyusunan dokumen kurikulum yang memiliki kesamaan antar sekolah, kurangnya dukungan pemerintah daerah khususnya dalam hal pengembangan profesi guru dan status pegawai, serta tidak sesuainya kualifikasi akademik guru dengan mata pelajaran yang diampu khususnya pada muatan lokal pendidikan lingkungan hidup.
4. Implementasi muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung berdasarkan aspek proses menunjukkan hasil positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung pada aspek proses sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Hasil positif yang diperoleh dari aspek proses disebabkan karena respon positif yang diberikan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan berlangsungnya supervisi yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap dokumen kurikulum dan proses pembelajaran di kelas.
 5. Implementasi muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung berdasarkan aspek produk menunjukkan hasil positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi muatan lokal di SMA Negeri Kota Bandung pada aspek produk sesuai dengan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2013 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Hasil positif yang diperoleh dari aspek produk disebabkan karena respon positif peserta didik terhadap manfaat yang dirasakan dari muatan lokal yang diajarkan kepada mereka dan juga hasil belajar peserta didik yang termasuk kategori sangat baik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam penelitian ini.

1. Bagi Satuan Pendidikan

Pada aspek konteks, satuan pendidikan hendaknya melakukan analisis konteks terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar sekolah dan peserta didik. Berdasarkan analisis konteks tersebut, sekolah akan mengetahui kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh sekolah melalui muatan lokal.

Analisis dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar, perguruan tinggi, LPMP, dinas-dinas terkait, dan dunia industri yang berada di sekitar sekolah. Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan kedalam bentuk kompetensi untuk selanjutnya diusulkan kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan melalui kebijakan daerah. Hal ini dilakukan agar muatan lokal yang dilakukan sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan materi muatan lokal yang dipelajari di sekolah. Proses pengajuan usulan muatan lokal oleh satuan pendidikan di atur dalam Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.

Pada aspek masukan, satuan pendidikan khususnya para guru hendaknya mengembangkan RPP secara mandiri dengan disesuaikan kondisi dan karakteristik lingkungan sekolah dan peserta didik. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan pelatihan sendiri atau memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan yang dapat mengembangkan kompetensi guru, misalkan saja pelatihan pengembangan RPP, penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran dan berbagai pelatihan lainnya. Terkait ketersediaan sumber daya manusia, satuan pendidikan hendaknya memperhatikan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki setidaknya berdasarkan jenjang pendidikan dan kualifikasi akademik. Apabila tidak terdapat sumber daya manusia yang memiliki jenjang pendidikan dan kualifikasi akademik yang sesuai dengan muatan lokal yang akan diterapkan di sekolah, sebaiknya muatan lokal tersebut tidak dilaksanakan terlebih dahulu hingga memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan.

Pada aspek proses, satuan pendidikan hendaknya meningkatkan kualitas supervisi dan pengawasan kembali terhadap dokumen kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Melalui supervisi dan pengawasan yang dilakukan, kualitas dari dokumen dan penyelenggaraan pembelajaran akan menjadi lebih optimal. Selain itu satuan pendidikan hendaknya terus memberikan kesempatan bagi guru untuk terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki agar implementasi kurikulum muatan lokal dapat berjalan lebih baik.

Pada aspek produk, satuan pendidikan hendaknya secara konsisten melaksanakan program-program yang berkualitas demi menunjang pelaksanaan muatan lokal di sekolah. Melalui program-program tersebut, peserta didik memiliki wadah untuk menyalurkan kemampuan yang telah dipelajari di kelas khususnya mengenai muatan lokal. Program-program yang diselenggarakan sekolah hendaknya melibatkan partisipasi pihak eksternal sekolah seperti masyarakat, pemuka agama, dan dunia industri sehingga peserta didik dapat memperoleh wawasan mengenai penerapan muatan lokal di dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pada aspek konteks, pemerintah daerah hendaknya memperjelas kembali kebijakan terkait pelaksanaan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup. Hal tersebut diperlukan karena satuan pendidikan memerlukan kejelasan terkait muatan lokal pendidikan lingkungan hidup. Banyak sekolah menganggap dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka secara tidak langsung menghapus Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup. Walaupun pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tidak menyebutkan apapun terkait penghapusan peraturan Gubernur Jawa Barat terkait pelaksanaan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup.

Pemerintah daerah dapat mengeluarkan revisi terkait kebijakan mengenai pendidikan lingkungan hidup. Salah satu poin revisi terkait kebijakan pendidikan lingkungan hidup yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran lain yang relevan. Untuk mengeluarkan revisi tersebut, pemerintah daerah perlu melaksanakan kajian akademik yang dapat membantu pemerintah daerah untuk menganalisis kompetensi-kompetensi dalam pendidikan lingkungan hidup yang

dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Kajian akademik dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi, LPMP, tokoh masyarakat, dan dinas-dinas terkait. Kompetensi pendidikan lingkungan hidup dan integrasi tersebut dapat dituangkan ke dalam kebijakan berupa peraturan daerah.

Pada aspek masukan pemerintah daerah hendaknya memberikan kepastian status pegawai dan secara konsisten memberikan bantuan baik berupa sertifikasi maupun pelatihan bagi seluruh guru muatan lokal sehingga proses implementasi muatan lokal dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, dalam rangka penguatan pelaksanaan muatan lokal bahasa sunda dan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran lain, pemerintah daerah hendaknya memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu guru untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki dan memahami secara lebih mendalam mengenai makna dan karakteristik muatan lokal yang diajarkan di sekolah. Pelatihan dapat berupa pelatihan pengembangan RPP, penggunaan media dan teknologi, pendalaman mengenai materi muatan lokal, dan berbagai pelatihan lainnya.

Pemerintah daerah pun hendaknya melaksanakan program-program yang dapat mendukung pelaksanaan muatan lokal di propinsi Jawa Barat. Program tersebut hendaknya dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk menyalurkan kemampuan yang telah dipelajari di sekolah. Terkait muatan lokal bahasa daerah, selain lomba-lomba yang diadakan, pemerintah juga dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan karya-karya yang memiliki nilai kearifan lokal. Karya tersebut dapat dipamerkan untuk mendorong pariwisata atau minat warga lokal maupun luar daerah untuk mempelajari bahasa dan sastra daerah propinsi Jawa Barat.

Untuk pendidikan lingkungan hidup, pemerintah daerah dapat memfasilitasi peserta didik untuk membuat inovasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup khususnya di Kota Bandung. Inovasi tersebut dapat berupa solusi atas masalah lingkungan hidup yang terjadi saat ini ataupun pencegahan masalah lingkungan hidup.

Melalui beragam program tersebut, muatan lokal tidak menjadi mata pelajaran yang hanya dipelajari di sekolah namun juga dapat diterapkan di

kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian fungsi dari muatan lokal di dalam kurikulum dapat dilaksanakan dengan optimal.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian yang telah dilakukan ini dapat dijadikan referensi awal bagi peneliti lain untuk melakukan evaluasi implementasi kurikulum muatan lokal secara lebih mendalam. Penggalan data yang lebih mendalam dapat dilakukan pada satu atau beberapa satuan pendidikan melalui pendekatan kualitatif. Sehingga diperoleh data yang lebih mendalam dan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah diperoleh.